

# IMPLIKASI DIALOG TERBUKA TERHADAP PERAN PERWAKILAN POLITIK DPRD

Studi Kasus Tentang Peran Perwakilan Politik DPRD Tingkat Propinsi  
Di Daerah Istimewa Yogyakarta

## SKRIPSI

KK

Fis P 06/01

Bud  
i



OLEH :

**UNTORO BUDIYATNO**

**NIM : 079313971**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000 - 2001**

# **IMPLIKASI DIALOG TERBUKA TERHADAP PERAN PERWAKILAN POLITIK DPRD**

**Studi Kasus Tentang Peran Perwakilan Politik DPRD Tingkat Propinsi  
Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga**

**OLEH :**

**UNTORO BUDIYATNO**

**NIM : 079313971**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000 - 2001**

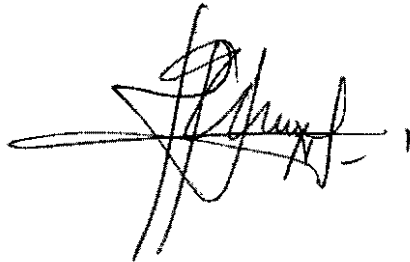
## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi ini **disetujui** untuk diuji.

Surabaya, 1 Desember 2000

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dwi Windyastuti', written over a horizontal line.

**Dra. Dwi Windyastuti, MA.**

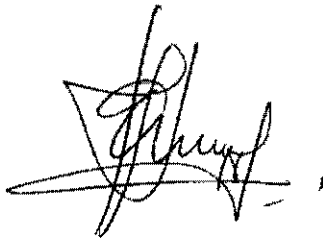
**NIP. 131 801 643**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diujikan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 14 Desember 2000 Pukul 10.00 BBW1  
Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga**

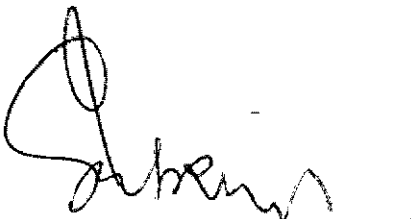
### DEWAN PENGUJI

**Ketua**

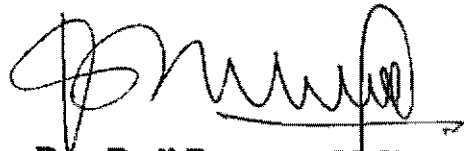


**Dra. Dwi Windyastuti, MA.**  
**NIP. 131 801 643**

**Anggota**



**Drs. Sutrisno, MA.**  
**NIP. 130 937 951**



**Drs. Budi Prasetyo, M.Si.**  
**NIP. 130 918 696**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bermula dari gagasan mengenai demokrasi yang mendasari adanya sistem perwakilan politik, dimana perwakilan politik yang berada di daerah dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana tugas dan kewajiban DPRD yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 1999, pasal 18 huruf h yakni menampung menindak lanjuti aspirasi masyarakat maka berbagai upaya dilaksanakan oleh DPRD diantaranya melalui komunikasi yang intensif dengan masyarakat.

Penelitian ini mencoba menelaah pengaruh *Dialog terbuka* yang menjadi wahana komunikasi politik DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui apa dan bagaimana dialog terbuka yang terdapat pada DPRD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.; (2) mengetahui sejauhmana implikasi dialog terbuka terhadap peran perwakilan politik DPRD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.; (3) mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi DPRD terkait dengan tugas serta kewajibannya menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif, dimana menggunakan hipotesis yakni *Dialog terbuka mempunyai implikasi positif terhadap peran perwakilan politik*. Fokus penelitian ini hubungan antara variabel dialog terbuka dengan peran perwakilan politik DPRD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data primer melalui teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) sedang data sekunder diperoleh dari dokumen/arsip dan laporan-laporan aktifitas dewan di bagian sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya wakil rakyat untuk mendekatkan masyarakat dengan DPRD dalam rangka untuk menampung dan

menindaklanjuti aspirasi daerah sudah optimal, tetapi dalam pengambilan kebijakan, utamanya adalah peraturan daerah yang mengatur dan mengikat masyarakat atau publik khususnya masyarakat Yogyakarta, maka peran dewan sangat jauh dari optimal.

DPRD sebagai legislatif daerah ternyata tidak dapat berbuat banyak dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dijadikan peraturan daerah, hal ini dikarenakan ketidakmampuan DPRD menggunakan hak inisiatif dalam membuat rancangan undang-undang dan selalu menyerahkan kepada pihak eksekutif.

Kemampuan DPRD dalam hal mendesakkan kepentingan aspirasi masyarakat kepada eksekutif juga sangat terbatas disebabkan posisi Kepala Daerah yang pada kenyataannya berada beberapa tingkat diatas kewenangan DPRD (Kepala Daerah juga sebagai Raja keraton yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh Masyarakat). Hanya atas kebijaksanaan Kepala Daerah maka berbagai aspirasi masyarakat dapat diterima dan dijadikan pedoman bagi penerapan atau pembuatan keputusan dan peraturan selanjutnya.